



REPUBLIK INDONESIA

**PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT
UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN
PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI
DI KOTA LOS CABOS PADA 6 SEPTEMBER 2002**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat berkeinginan untuk mengubah Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Kota Los Cabos pada 6 September 2002 (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan"),

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

Pasal I

Huruf a) dalam ayat 3 dari Pasal 2 dalam Persetujuan wajib diubah dan diganti menjadi sebagai berikut:

"(a) di Meksiko

- (i) pajak penghasilan federal (*el impuesto sobre la renta federal*);
- (ii) pajak bisnis tarif tunggal (*el impuesto empresarial a tasa única*);

(selanjutnya disebut sebagai "Pajak Meksiko");"

Pasal II

Pasal 26 dalam Persetujuan wajib diubah dan diganti menjadi sebagai berikut:

"Pasal 26 Pertukaran Informasi

1. Otoritas yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan wajib melakukan pertukaran informasi yang dipandang relevan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan administrasi atau penegakan hukum dalam perundang-undangan domestik Negara pihak pada Persetujuan tersebut yang berkaitan dengan pajak-pajak setiap hal dan deskripsi yang diterapkan atas nama Negara pihak pada Persetujuan, sub bagian atas dasar politik atau otoritas lokal sepanjang pengenaan pajak tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi ini tidak dibatasi dengan Pasal 1 dan 2.

2. Setiap informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Negara pihak pada Persetujuan wajib diperlakukan rahasia yang sama dengan perlakuan untuk informasi yang diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik Negara dan wajib diungkapkan hanya kepada orang-orang dan/atau otoritas (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan atas, penegakan hukum atau penuntutan terkait dengan, penetapan keberatan yang terkait dengan pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, atau kelalaian terhadap hal tersebut di atas. Orang-orang dan/atau otoritas tersebut hanya boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Mereka dapat mengungkap informasi tersebut dalam proses pengadilan atau dalam putusan pengadilan. Tanpa mengesampingkan hal tersebut, informasi yang diterima oleh suatu pihak pada Persetujuan dapat digunakan untuk tujuan lain sepanjang informasi dimaksud dapat digunakan untuk tujuan lain tersebut berdasarkan ketentuan hukum di kedua Negara pihak pada Persetujuan dan otoritas berwenang dari Negara yang memberikan informasi mengizinkan penggunaan dimaksud.

3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 wajib tidak dimaksudkan untuk mewajibkan Negara pihak pada Persetujuan:

- (a) untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan atau praktik administrasi yang berlaku di Negara pihak tersebut pada Persetujuan atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
- (b) untuk memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam pelaksanaan administrasi yang lazim di Negara Pihak tersebut pada Persetujuan atau Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
- (c) untuk memberikan informasi yang akan mengungkapkan rahasia perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian profesi, atau proses dagang, atau informasi yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijakan publik (*ordre public*).

4. Jika informasi yang diminta oleh satu Negara pihak pada Persetujuan sesuai dengan Pasal ini, Negara pihak lainnya pada Persetujuan wajib menggunakan tindakan-tindakan pengumpulan informasi untuk memperoleh informasi yang diminta tersebut, meskipun Negara lainnya tersebut tidak memerlukan informasi dimaksud untuk tujuan perpajakannya sendiri. Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelum dibatasi oleh ketentuan dalam ayat 3 namun sama sekali tidak akan ditafsirkan oleh Pihak pada Persetujuan untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena Pihak pada Persetujuan tersebut tidak memiliki kepentingan domestik atas informasi yang diminta tersebut.

5. Ketentuan-ketentuan pada ayat 3 sama sekali wajib tidak ditafsirkan untuk memperbolehkan Negara pihak pada Persetujuan untuk menolak memberikan informasi karena informasi yang diminta tersebut dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, nominee atau orang/badan yang bertindak sebagai agen atau kapasitas fidusier atau karena informasi yang diminta tersebut berkaitan dengan kepentingan kepemilikan di suatu badan."

Pasal III

1. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan wajib memberitahukan Negara pihak lainnya pada Persetujuan secara tertulis melalui saluran diplomatik

mengenai terpenuhinya prosedur formal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan masing-masing untuk berlakunya Protokol ini. Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari ke tiga puluh (30) sejak tanggal diterimanya pemberitahuan paling akhir di antara kedua pemberitahuan tersebut.

2. Protokol ini wajib berhenti berlaku efektif pada saat Persetujuan berhenti berlaku efektif sesuai dengan Pasal 29 dalam Persetujuan.


3. Protokol ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan.

SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, telah diberi kuasa dari Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

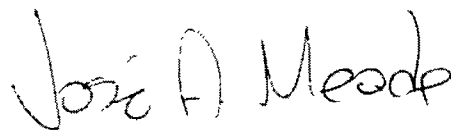
DIBUAT di Nusa Dua, Bali, 6 Oktober 2013 dalam rangkap dua, masing masing dalam bahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan penerapan Protokol ini, naskah dalam bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH
MEKSIKO SERIKAT**



Muhamad Chatib Basri
Menteri Keuangan



José Antonio Meade Kuribreña
Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

PROTOCOLO QUE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE LOS CABOS EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2002

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, deseando modificar el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Indonesia y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Los Cabos el 6 de septiembre de 2002 (en adelante denominado "el Acuerdo"),

HAN ACORDADO lo siguiente:

Artículo I

El inciso a) del párrafo 3 del Artículo 2 del Acuerdo deberá modificarse y reemplazarse por el siguiente:

"(a) en México:

- (i) el impuesto sobre la renta federal;
 - (ii) el impuesto empresarial a tasa única;
- (en adelante denominados el "impuesto mexicano");"

Artículo II

El Artículo 26 del Acuerdo deberá modificarse y reemplazarse por el siguiente:

"Artículo 26

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la información que sea previsiblemente relevante para aplicar lo dispuesto en el presente Acuerdo o para la administración o aplicación de la legislación interna relativa a los impuestos de cualquier clase y naturaleza exigidos por los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas o entidades locales, en la medida en que dicha imposición no sea contraria al Acuerdo. El intercambio de información no está limitado por los Artículos 1 y 2.

2. Cualquier información recibida de conformidad con el párrafo 1 por un Estado Contratante deberá mantenerse secreta de igual forma que la información obtenida con base en la legislación interna de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la determinación o recaudación de los impuestos señalados en el párrafo 1, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos, de la resolución de los recursos relativos a los mismos, o encargadas de verificar el cumplimiento de todo lo anterior. Estas personas o autoridades sólo utilizarán la información para tales fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. No obstante lo antes dispuesto, la información recibida por un Estado Contratante podrá utilizarse para otros fines cuando dicha información pueda ser utilizada de esa forma conforme a la legislación de ambos Estados y la autoridad competente del Estado que proporciona la información autorice dicho uso.

3. En ningún caso las disposiciones de los párrafos 1 y 2 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

- (a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación y práctica administrativa, o a las del otro Estado Contratante;
- (b) suministrar información que no se pueda obtener de conformidad con su legislación o en el ejercicio normal de su práctica administrativa, o de las del otro Estado Contratante;

- (c) suministrar información que revele un secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional o un procedimiento comercial, o información cuya comunicación sea contraria al orden público (*ordre public*).

4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente Artículo, el otro Estado Contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aún cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines impositivos. La obligación precedente está sujeta a las limitaciones del párrafo 3, pero en ningún caso dichas limitaciones deberán interpretarse en el sentido de permitir a un Estado Contratante negarse a otorgar la información únicamente porque no tiene un interés interno en dicha información.

5. En ningún caso las disposiciones del párrafo 3 deberán interpretarse en el sentido de permitir a un Estado Contratante a negarse a proporcionar la información únicamente porque la misma sea detentada por un banco, otra institución financiera, agente o de una persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque se relaciona con la participación en la titularidad de una persona.”

Artículo III

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos requeridos por su legislación para la entrada en vigor del presente Protocolo. El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo (30º) día posterior a la fecha de recepción de la última de las dos notificaciones.

2. El presente Protocolo dejará de surtir efectos en el momento en el que el Acuerdo deje de surtir efectos de conformidad con el Artículo 29 del Acuerdo.

3. El presente Protocolo formará parte integrante del Acuerdo.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

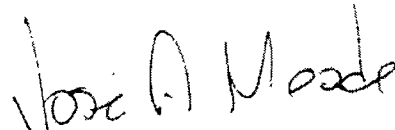
HECHO por duplicado en Bali, Indonesia, el 6 de octubre de 2013, cada uno en los idiomas indonesio, español e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de cualquier divergencia de interpretación y aplicación del presente Protocolo, el texto en inglés prevalecerá.

**POR EL GOBIERNO
DE LA
REPÚBLICA DE INDONESIA**



Muhamad Chatib Basri
Ministro de Finanzas

**POR EL GOBIERNO
DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**



José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Relaciones Exteriores



REPUBLIK INDONESIA

**PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE UNITED MEXICAN STATES
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION
OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
SIGNED AT THE CITY OF LOS CABOS ON 6 SEPTEMBER 2002**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States desiring to amend the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Mexican States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at the city of Los Cabos on 6 September 2002 (hereinafter referred to as "the Agreement"),

HAVE AGREED as follows:

Article I

Subparagraph a) of paragraph 3 of Article 2 of the Agreement shall be amended and replaced by the following:

"(a) in Mexico:

- (i) the federal income tax (*el impuesto sobre la renta federal*);
- (ii) the business flat rate tax (*el impuesto empresarial a tasa única*);

(hereinafter referred to as "Mexican tax");"

Article II

Article 26 of the Agreement shall be amended and replaced by the following:

"Article 26 EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Article III

1. Each of the Contracting States shall notify the other through diplomatic channels of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the date of receipt of the latter of the two notifications.

2. This Protocol shall cease to be effective at such time as the Agreement ceases to be effective in accordance with Article 29 of the Agreement.

3. This Protocol shall form an integral part of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

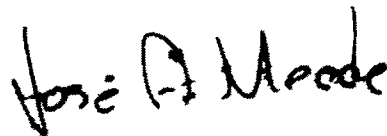
DONE at Nusa Dua, Bali, on 6 October 2013, in duplicate, each in the Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation and the application of this Protocol, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA



Muhamad Chatib Basri
Minister of Finance

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED MEXICAN STATES



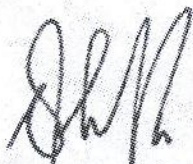
José Antonio Meade Kuribreña
Secretary for Foreign Affairs

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

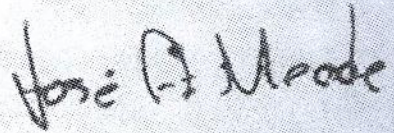
DONE at Nusa Dua, Bali, on 6 October 2013, in duplicate, each in the Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation and the application of this Protocol, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED MEXICAN STATES



Muhamad Chatib Basri
Minister of Finance



José Antonio Meade Kuribreña
Secretary for Foreign Affairs

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0004/CTC/01/2019/52
Number



Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 04 Januari 2019
Date